

## BAB 5

### PENUTUP

#### 5.1. Kesimpulan

Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Papua, Sumatera Selatan dan Jawa Tengah merupakan lima provinsi yang memiliki kekayaan alam berupa sumber daya mineral yang melimpah. Hal tersebut dilihat berdasarkan pendapatan kelima provinsi dari dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan umum yang diterima. Pendapatan yang berasal dari sumber daya mineral perlu dialokasikan untuk pengeluaran bidang yang produktif seperti pengeluaran untuk bidang kesehatan, pendidikan, dan pembangunan infrastruktur. Pengeluaran pada bidang kesehatan dan pendidikan akan dapat memberikan manfaat bagi modal manusia. Ketika modal manusia lebih berkualitas maka dapat meningkatkan produktivitas. Selain itu, pengeluaran pada pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jalan raya beraspal dapat memberikan manfaat seperti dapat mendukung dunia usaha serta menghubungkan pusat perekonomian. Pada akhirnya, pengeluaran yang dilakukan pada bidang produktif dapat mendorong kinerja perekonomian suatu wilayah dalam jangka panjang.

Untuk menentukan apakah suatu wilayah mengalokasikan pendapatannya secara tepat yaitu untuk pengeluaran di bidang yang produktif, maka digunakan suatu indikator yaitu *Sustainable Budget Index* (SBI). SBI suatu wilayah yang bernilai lebih kecil dari satu ( $<1$ ) memiliki arti bahwa pendapatan mineral suatu wilayah digunakan untuk membiayai pengeluaran di bidang yang produktif. Sebaliknya, jika suatu wilayah memiliki nilai SBI lebih besar dari satu ( $>1$ ) berarti sebagian pendapatan mineral digunakan untuk membiayai pengeluaran bidang yang tidak produktif.

Tujuan penelitian ini adalah memanfaatkan SBI untuk menjelaskan penyebab mengapa sebuah wilayah yang kaya mineral, memiliki kinerja ekonomi yang buruk. Hasil penghitungan dengan menggunakan rumus SBI menunjukkan bahwa Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan memiliki nilai SBI lebih besar dari satu yaitu sebesar 1,007 dan 1,129, sedangkan Papua, Sumatera Selatan dan Jawa Tengah memiliki nilai SBI lebih kecil dari satu yaitu masing-masing sebesar 0,714, 0,476 dan 0,689. Selain itu, berdasarkan hasil regresi model tanpa DSBI, diperoleh hasil bahwa peningkatan angka harapan hidup penduduk sebesar satu tahun akan meningkatkan PDRB sebesar 2,5 triliun rupiah. Saat investasi meningkat sebesar satu juta US\$ akan meningkatkan PDRB sebesar 1,8 miliar rupiah. Variabel

panjang jalan beraspal yang merupakan *proxy* untuk penyediaan infrastuktur, koefisiennya signifikan secara statistik. Apabila panjang jalan beraspal bertambah satu kilometer akan meningkatkan PDRB sebesar 7,8 miliar rupiah. Berdasarkan hasil estimasi yang diperoleh dari model dengan DSBI, peningkatan variabel angka harapan hidup penduduk sebesar satu tahun di suatu provinsi akan meningkatkan PDRB sebesar 4,8 triliun rupiah. Ketika investasi yang ditanamkan di suatu provinsi meningkat sebesar satu juta US\$ akan meningkatkan PDRB sebesar 1,6 miliar rupiah. Saat panjang jalan beraspal di suatu provinsi bertambah sebesar satu kilometer akan meningkatkan PDRB sebesar 6,1 miliar rupiah. Peningkatan satu tahun pada rata-rata lama bersekolah penduduk di suatu provinsi akan meningkatkan PDRB sebesar 1,6 triliun rupiah. Variabel indikator SBI yang signifikan secara statistik terhadap PDRB kelima provinsi memiliki makna bahwa provinsi yang pengelolaan pendapatan mineralnya lebih baik akan meningkatkan PDRB sebesar 1,4 triliun rupiah.

## **5.2. Implikasi Kebijakan**

Seperti yang telah dibahas dalam penelitian ini, Papua, Sumatera Selatan dan Jawa Tengah telah mengelola pendapatan yang berasal dari sumber daya mineral dengan cara yang tepat yaitu menggunakan pendapatannya untuk membiayai pengeluaran di bidang yang produktif. Sebaliknya, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan gagal dalam mengelola pendapatan mineralnya secara tepat. Kedua provinsi tersebut menggunakan pendapatan mineral untuk membiayai pengeluaran yang tidak produktif. Penelitian ini menunjukkan bahwa provinsi yang berhasil mengelola pendapatan mineral secara tepat akan memiliki kinerja perekonomian yang lebih baik dalam jangka panjang.

Berdasarkan temuan tersebut, penulis berpendapat akan sangat baik bagi Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan yang memiliki nilai SBI tidak baik, meniru langkah yang dilakukan oleh Papua, Sumatera Selatan dan Jawa Tengah yang memiliki nilai SBI baik, dimana ketiga provinsi mengalokasikan pendapatan mineral untuk membiayai pengeluaran di bidang kesehatan, pendidikan dan pembangunan jalan raya beraspal. Sehingga diharapkan, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan dapat mengelola pendapatan mineral dengan cara yang tepat yaitu digunakan untuk membiayai pengeluaran yang produktif, sehingga dalam jangka panjang dapat berkontribusi bagi perekonomian suatu wilayah.

Selain langkah diatas, salah satu langkah lain yang dapat dilakukan yaitu wilayah membentuk semacam Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dalam cakupan

provinsi. Masing-masing provinsi mengelola pendapatan yang berasal dari sumber daya mineral untuk digunakan sebagai dana abadi pendidikan. Dana abadi pendidikan tersebut kemudian digunakan untuk membiayai berbagai program yang mendukung pendidikan, seperti beasiswa pendidikan di masing-masing provinsi. Akan tetapi, penulis berpendapat bahwa para penerima beasiswa setelah selesai menjalani program beasiswa wajib untuk kembali ke daerah masing-masing. Hal itu dilakukan untuk mencegah terjadinya fenomena *brain drain*. Fenomena *brain drain* merupakan fenomena langkanya sumber daya manusia yang berkualitas di suatu daerah akibat sumber daya manusia yang berkualitas berpindah ke daerah lain yang lebih maju. Maka dari itu diharapkan, dengan adanya sumber daya manusia yang berkualitas dapat berkontribusi dalam mendorong perekonomian masing-masing provinsi.

Berbagai saran kebijakan di atas mensyaratkan estimasi yang baik. Karena itu, upaya untuk memperbaiki model yang digunakan pada penelitian ini tentunya dibutuhkan. Misalnya, dengan melakukan penghitungan SBI untuk tahun-tahun yang berbeda. Hal ini bermanfaat guna menemukan pada jeda waktu (*time-lag*) berapa yang paling baik untuk mengestimasi kontribusi jangka panjang pengelolaan pendapatan sumber daya alam tidak terbarukan bagi kinerja perekonomian daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- African Natural Resources Center & African Development Bank. (2016). *Botswana's mineral revenues and expenditure and savings policy*. Retrieved Maret 13, 2019, from Europarl Europa website: [http://www.europarl.europa.eu/intcoop/acp/2016\\_botswana/pdf/study-en.pdf](http://www.europarl.europa.eu/intcoop/acp/2016_botswana/pdf/study-en.pdf)
- Aghion, P., Howitt, P., & Murin, F. (2011). The relationship between health and growth: When Lucas meets Nelson-Phelps. *Review of Economics and Institutions*, 2(1), 1-22.
- Amundsen, I. (2013). *Governance of the petroleum sector in an emerging developing economy*. England: Gower Publishing Limited.
- Anas, R., Tamin, O. Z., & Wibowo, S. S. (2017). Pengaruh investasi infrastruktur jalan terhadap sektor industri pengolahan. *Jurnal Transportasi*, 17(2), 145-154.
- Arsyad, L. (1988). *Ekonomi pembangunan* (1st ed.). Yogyakarta: STIE-YKPN.
- Arsyad, L. (2010). *Ekonomi pembangunan* (5 ed.). Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Badan Koordinasi Penanaman Modal. (2017). *Statistic - Foreign Direct Investment (FDI) & Domestic Direct Investment (DDI)*. Retrieved Mei 10, 2019, from bkpm.go.id: <https://www.bkpm.go.id/en/statistic/domestic-direct-investment-ddi>
- Badan Pusat Statistik. (2015). *Indeks pembangunan manusia*. Retrieved Mei 16, 2019, from [www.ipm.bps.go.id](http://www.ipm.bps.go.id): <https://ipm.bps.go.id/page/ipm>
- Badan Pusat Statistik. (2018, Juni 28). *Realisasi Investasi Penanaman Modal Luar Negeri Menurut Provinsi*. Retrieved Mei 2, 2019, from [bps.go.id](http://bps.go.id): <https://www.bps.go.id/statictable/2014/09/17/1337/realisasi-investasi-penanaman-modal-luar-negeri-menurut-provinsi-sup-1-sup-juta-us-2006-2017.html>
- Badan Pusat Statistik. (n.d.). *Data Nasional 2013: Tabel Angka Harapan Hidup (Metode Lama)*. Retrieved Mei 5, 2019, from [ipm.bps.go.id](http://ipm.bps.go.id): <https://ipm.bps.go.id/data/nasional/metode/lama>
- Badan Pusat Statistik. (n.d.). *Data Nasional 2013: Tabel Rata-rata Lama Sekolah (Metode Lama)*. Retrieved Mei 12, 2019, from [ipm.bps.go.id](http://ipm.bps.go.id): <https://ipm.bps.go.id/data/nasional/metode/lama>
- Badan Pusat Statistik. (n.d.). *Data Nasional 2018: Tabel Angka Harapan Hidup (Metode Baru)*. Retrieved Mei 7, 2019, from [ipm.bps.go.id](http://ipm.bps.go.id): <https://ipm.bps.go.id/data/nasional>
- Badan Pusat Statistik. (n.d.). *Data Nasional 2018: Tabel Rata-rata Lama Sekolah (Metode Baru)*. Retrieved Mei 7, 2019, from [ipm.bps.go.id](http://ipm.bps.go.id): <https://ipm.bps.go.id/data/nasional>
- Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur. (2011). *Provinsi Kalimantan Timur dalam Angka 2011*. BPS Provinsi Kalimantan Timur.
- Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur. (2014). *Kalimantan Timur dalam Angka 2014*. Samarinda: BPS Provinsi Kalimantan Timur.

- Badan Pusat Statistik. (n.d.). *SIRUSA BPS*. Retrieved Maret 3, 2019, from [www.sirusa.bps.go.id](http://www.sirusa.bps.go.id):  
<https://sirusa.bps.go.id/index.php?r=indikator/view&id=48>
- Badan Pusat Statistik. (n.d.). *Sirusa: Rata-rata lama sekolah*. Retrieved Maret 3, 2019, from [sirusa.bps.go.id](http://sirusa.bps.go.id):  
<https://sirusa.bps.go.id/index.php?r=indikator/view&id=572>
- Badan Pusat Statistik. (n.d.). *Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Provinsi, 2000-2013 (Milyar Rupiah)*. Retrieved Maret 9, 2019, from [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id):  
<https://www.bps.go.id/dynamic/2009/06/29/1600/produk-domestik-regional-bruto-atas-dasar-harga-konstan-2000-menurut-provinsi-2000-2013-milyar-rupiah-.html>
- Badan Pusat Statistik. (n.d.). *Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Provinsi, 2010-2017 (Miliar Rupiah)*. Retrieved Maret 9, 2019, from [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id):  
<https://www.bps.go.id/dynamic/2015/10/07/956/-seri-2010-produk-domestik-regional-bruto-atas-dasar-harga-konstan-2010-menurut-provinsi-2010-2016-miliar-rupiah-.html>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. (2013). *Jawa Tengah dalam Angka 2013*. Semarang: BPS Provinsi Jawa Tengah.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. (2014). *Jawa Tengah dalam Angka 2014*. Semarang: BPS Provinsi Jawa Tengah.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. (2018, Agustus 27). *Panjang Jalan Kabupaten/Kota Menurut Jenis Permukaan Di Jawa Tengah, 2015 (Km)*. Retrieved Mei 21, 2019, from [jateng.bps.go.id](http://jateng.bps.go.id):  
<https://jateng.bps.go.id/statictable/2017/02/27/1463/panjang-jalan-kabupaten-kota-menurut-jenis-permukaan-di-jawa-tengah-2015-km-.html>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. (2018, Oktober 25). *Penduduk Jawa Tengah Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Seminggu Yang Lalu dan Jenis Kelamin di Provinsi Jawa Tengah, 2007-2017*. Retrieved Mei 25, 2019, from [jateng.bps.go.id](http://jateng.bps.go.id):  
<https://jateng.bps.go.id/statictable/2017/03/22/1476/penduduk-jawa-tengah-berumur-15-tahun-ke-atas-menurut-jenis-kegiatan-seminggu-yang-lalu-dan-jenis-kelamin-di-provinsi-jawa-tengah-2007-2017.html>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan. (2009). *Kalimantan Selatan dalam Angka 2009*. Banjarmasin: BPS Povinsi Kalimantan Selatan.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan. (2010). *Kalimantan Selatan dalam Angka 2010*. Banjarmasin: BPS Provinsi Kalimantan Selatan.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan. (2011). *Kalimantan Selatan dalam Angka 2011*. Banjarmasin: BPS Provinsi Kalimantan Selatan.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan. (2012). *Kalimantan Selatan dalam Angka 2012*. Banjarmasin: BPS Provinsi Kalimantan Selatan.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan. (2013). *Kalimantan Selatan dalam Angka 2013*. Banjarmasin: BPS Provinsi Kalimantan Selatan.

- Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan. (2014). *Kalimantan Selatan dalam Angka 2014*. Banjarmasin: BPS Provinsi Kalimantan Selatan.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan. (2015). *Kalimantan Selatan dalam Angka 2015*. Banjarmasin: BPS Provinsi Kalimantan Selatan.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan. (2016). *Kalimantan Selatan dalam Angka 2016*. Banjarmasin: BPS Provinsi Kalimantan Selatan.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan. (n.d.). *Jumlah Penduduk Bekerja (Jiwa) Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2007-2017*. Retrieved Mei 27, 2019, from <https://kalsel.bps.go.id/dynamictable/2017/04/28/921/jumlah-penduduk-bekerja-jiwa-menurut-kabupaten-kota-tahun-2007-2017.html>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Papua. (2010). *Papua dalam Angka 2010*. Jayapura: BPS Provinsi Papua.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Papua. (2011). *Papua dalam Angka 2011*. BPS Provinsi Papua.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Papua. (2014). *Papua dalam Angka 2014*. BPS Provinsi Papua.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Papua. (2014). *Papua dalam Angka 2014*. BPS Provinsi Papua.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Papua. (2015). *Papua dalam Angka 2015*. BPS Provinsi Papua.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Papua. (2015). *Papua dalam Angka 2015*. BPS Provinsi Papua.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Papua. (2016). *Papua dalam Angka 2016*. BPS Provinsi Papua.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Papua. (2016). *Papua dalam Angka 2016*. BPS Provinsi Papua.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan. (n.d.). *Jumlah Penduduk, yang Bekerja, Penganggur Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran menurut Tahun di Provinsi Sumatera Selatan, 2000-2017*. Retrieved Mei 29, 2019, from [sumsel.bps.go.id: https://sumsel.bps.go.id/dynamictable/2016/09/28/127/jumlah-penduduk-yang-bekerja-penganggur-angkatan-kerja-dan-tingkat-pengangguran-menurut-tahun-di-provinsi-sumatera-selatan-2000-2017.html](https://sumsel.bps.go.id/dynamictable/2016/09/28/127/jumlah-penduduk-yang-bekerja-penganggur-angkatan-kerja-dan-tingkat-pengangguran-menurut-tahun-di-provinsi-sumatera-selatan-2000-2017.html)
- Bank Indonesia. (n.d.). *Informasi dasar produk domestik regional bruto (PDRB)*. Retrieved April 019, 2019, from [www..bi.go.id: https://www.bi.go.id/id/statistik/metadata/sekda/Documents/8PDRBSEKDA1.pdf](https://www.bi.go.id/id/statistik/metadata/sekda/Documents/8PDRBSEKDA1.pdf)
- Bloom, D. E., & Canning, D. (2000). Public health: the health and wealth of nations. *Science*, 287(5456), 1207-1209.
- Bokhari, A. A. (2017). Human capital investment and economic growth in Saudi Arabia: Error correction model. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 7(4), 104-112.

- BPS Jawa Tengah. (n.d.). *Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah*. Retrieved Mei 28, 2019, from [www.jateng.bps.go.id:https://jateng.bps.go.id/statictable/2017/02/14/1417/-seri-2000-pdrb-jawa-tengah-atas-dasar-harga-konstan-2000-menurut-lapangan-usaha-juta-rupiah-2000---2014.html](http://www.jateng.bps.go.id:https://jateng.bps.go.id/statictable/2017/02/14/1417/-seri-2000-pdrb-jawa-tengah-atas-dasar-harga-konstan-2000-menurut-lapangan-usaha-juta-rupiah-2000---2014.html)
- BPS. (n.d.). *SIRUSA BPS*. Retrieved Mei 22, 2019, from [sirusa.bps.go.id:https://sirusa.bps.go.id/index.php?r=indikator/view&id=48](https://sirusa.bps.go.id/index.php?r=indikator/view&id=48)
- BPS Provinsi Kalimantan Selatan. (n.d.). *(Seri 2010) PDRB triwulanan atas dasar harga konstan Provinsi Kalimantan Selatan menurut lapangan usaha tahun 2010-2018*. Retrieved Mei 23, 2019, from [kalsel.bps.go.id:dynamictable/2017/04/27/913/-seri-2010-pdrb-triwulanan-atas-dasar-harga-konstan-provinsi-kalimantan-selatan-menurut-lapangan-usaha-tahun-2010-2017.html](https://kalsel.bps.go.id:dynamictable/2017/04/27/913/-seri-2010-pdrb-triwulanan-atas-dasar-harga-konstan-provinsi-kalimantan-selatan-menurut-lapangan-usaha-tahun-2010-2017.html)
- Chukwuma, I. T. (2015). The resource curse in Nigeria: Lessons and policy option. *International Journal of Research in Humanities and Social Studies*, 2 (8), 38-42.
- Departemen Keuangan Republik Indonesia. (1969). *Nota keuangan pada rencana undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara peralihan triwulan I tahun 1969 (Januari s.d Maret 1969)*. Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia. Retrieved from [www.kemenkeu.go.id:https://www.kemenkeu.go.id/media/6574/apbn-1969.pdf](https://www.kemenkeu.go.id:https://www.kemenkeu.go.id/media/6574/apbn-1969.pdf)
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan. (2017). *Buku Pegangan Pengalokasian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam*. Jakarta: DJPK Kemenkeu.
- DJPK Kemenkeu. (n.d.). *Alokasi dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan umum*. Retrieved Januari 28, 2019, from <http://www.djpk.kemenkeu.go.id:http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=1199>
- DJPK Kemenkeu. (n.d.). *Setelah TA 2006*. Retrieved Januari 29, 2019, from [www.djpk.kemenkeu.go.id:http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=5412](http://www.djpk.kemenkeu.go.id:http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=5412)
- Dobbs, R., Oppenheim, J., Kendall, A., Thompson, F., Bratt, M., & Marel, F. v. (2013). *Reverse the curse: Maximizing the potential of resource-driven economies*. San Francisco: McKinsey Global Institute.
- Dritsaki, C., & Stiakakis, E. (2014). Foreign direct investments, exports, and economic growth in Croatia: A time series analysis. *Procedia Economics and Finance* 14, 14(2014), 181-190.
- Eckstein, O. (1967). *Public finance*. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall, Inc.
- Eggert, R. G. (2001). *Mining and economic sustainability: National economies and local communities*. England: International Institute For Environment And Development.
- EITI Indonesia. (2010-2016). *Laporan EITI Indonesia*. Jakarta: EITI Indonesia.
- EITI Indonesia. (2015). *Laporan kontekstual EITI Indonesia*. Jakarta: EITI Indonesia.
- Ferguson, C. E., & Gould, J. P. (1975). *Microeconomic theory*. Homewood, Illinois: Richard D. Irwin, Inc.
- Gujarati, D. N. (2003). *Basic econometrics*. New York: McGraw Hill Book Co.

- Gujarati, D. N. (2004). *Basic econometrics* (4th ed.). New York: McGraw-Hill/Irwin.
- Holden, S. (2013). Avoiding The Resource Curse The Case Norway. *Energy Policy*, 63(2013), 870-876.
- Hong, J., Chu, Z., & Wang, Q. (2011). Transport infrastructure and regional economic growth: Evidence from China. *Transportation*, 38(2011), 737-752.
- Horioka, C. Y. (1984). The applicability of the life-cycle hypothesis of saving to Japan. *Kyoto University Economics Review*, 54(2), 31-56.
- Indrawati, S., & Soebagiyo, D. (2006). Analisis uji kausalitas Penerimaan pajak dan pengeluaran pemerintah di Kota Surakarta dengan menggunakan etode Granger tahun 1978-2003. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 7(2), 162-183.
- Jaelani, A. (2017). Manajemen Pengeluaran Publik Di Indonesia: Tinjauan Ekonomi Islam Pada APBN 2017. *MPRA Paper*, 1-17.
- Joesron, T. S., & Fathorrozi, M. (2003). *Teori ekonomi mikro dilengkapi beberapa bentuk fungsi produksi* (1 ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Kadir, S. A., Azwardi, Wardhani, R. S., Novalia, N., & Maulana, A. (2018). The impact of physical and human capital on the economic growth of agriculture sector in South Sumatera. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 8(4), 322-326.
- Kementerian Keuangan. (2017, Desember 21). *Perencanaan Dan Penganggaran Keuangan Daerah*. Retrieved Februari 12, 2019, from [djpk.kemenkeu.go.id: http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=5747](http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=5747)
- Kementerian PPN. (2016). *Bab VI perangkat analisis untuk perencanaan*. Retrieved April 17, 2019, from [bappenas.go.id: https://www.bappenas.go.id/files/7913/5228/2106/bab-vi-perangkat-analisis-untuk-perencanaan.pdf](https://www.bappenas.go.id/files/7913/5228/2106/bab-vi-perangkat-analisis-untuk-perencanaan.pdf)
- Kesler, S. E. (2000). Mineral supply and demand into the 21st century. *Workshop on Deposit Modeling, Mineral Resource Assessment, And Their Role In Sustainable Development*, (pp. 55-62). Brazil.
- Kuo, C. C., & Yang, C. H. (2008). Knowledge capital and spillover on regional economic growth: Evidence from China. *China Economic Review*, 19(4), 594-604.
- Kurniawan, A. (2005). Fungsi Daya Dukung Sumberdaya Alam Terhadap Perkembangan Ekonomi Wilayah di Kabupaten Sleman. *Majalah Geografi Indonesia*, 19(2), 141-154.
- Kurniawan, D., & Tri Nur Hayati, T. P. (2015). Penerapan model Solow-Swan untuk memacu pertumbuhan ekonomi Kabupaten Demak. *Media Ekonomi Dan Manajemen*, 30(1), 68-75.
- Kusnadi, M. (1999). *Akuntansi Pemerintahan (Publik)*. Malang: UNIBRAW Malang.
- Lange, G.-M., & Wright, M. (2002). Sustainable development in mineral economies: The example of Botswana. *CEEPA Discussion Paper Series*, 1-40.
- Li, M. (2013). Corruption, transparency, and the resource curse. *International Journal Of Social Science And Humanity*, 3(6), 572-575.



- Lucas Jr., R. E. (1988). On the mechanics of economic development. *Journal Of Monetary Economics*, 22(1988), 3-42.
- Mankiw, N. G. (2008). Production and growth. In N. G. Mankiw, *Principles of Economics* (Vol. 6th Edition, p. 539). Canada: South-Western Cengage Learning.
- Maryaningsih, N., Hermansyah, O., & Savitri, M. (2014). Pengaruh infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, 17(1), 61-98.
- Natural Resource Governance Institute. (2015, Agustus). *Country strategy note*. Retrieved April 25, 2019, from [www.resourcegovernance.org](http://www.resourcegovernance.org): [https://resourcegovernance.org/sites/default/files/documents/nrgi\\_indonesia\\_strategy\\_20160803.pdf](https://resourcegovernance.org/sites/default/files/documents/nrgi_indonesia_strategy_20160803.pdf)
- Neeliah, H., & Seetanaah, B. (2016). Does human capital contribute to economic growth in Mauritius? *European Journal of Training and Development*, 40(4), 248-261.
- Nikzadian, A., Agheli, L., Arani, A. A., & Sadeghi, H. (2019). The effects of resource rent, human capital and government effectiveness on government health expenditure in organization of the petroleum exporting countries. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 9(2), 381-389.
- Njong, A. M. (2010). The effects of educational attainment on poverty reduction in Cameroon. *Journal of Education Administration and Policy Studies*, 2(1), 001-008.
- Nugraheni, S., Mokoginta, I. S., & Asfari, D. D. (2015). Towards sustainable development of Indonesian extractive industry. *Singapore Economic Review Conference 2015* (pp. 1-11). Singapore: Center For Economic Studies.
- Reza, F., & Widodo, T. (2013). The impact of education on economic growth. *Journal of Indonesian Economy and Business*, 28(1), 23-44.
- Samuelson, P. A., & Nordhaus, W. D. (2009). *Economics* (19th ed.). New York: McGraw-Hill Education.
- Stern, N. (1991, January). The determinants of growth. *The Economic Journal*, 101(404), 122-133.
- Stijns, J.-P. (2001). Natural resources abundance and human capital accumulation. *World Development*, 34(6), 1060-1083.
- Sugiyono. (2014). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarwoto. (2015). Desentralisasi, tata kelola pemerintahan, dan kemiskinan di negara-negara berkembang. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)*, 1(1), 14-16.
- Sukirno, S. (1985). *Ekonomi pembangunan: Proses, masalah, dan dasar kebijakan*. Jakarta: LPFE-UI.
- Suroso, G. (2015, Februari 9). *Infrastruktur dan pembangunan ekonomi*. Retrieved Juni 24, 2019
- Tambunan. (2005, Oktober). Kebijakan investasi dan pemulihan usaha. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi Politik*, 6(3).

- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2014). *Economic development* (12th ed.). New York: Trans-Atlantic Publications.
- UNDP. (2015). *Human development report 2015*. New York: United Nations Development Programme. Retrieved Mei 27, 2019, from [http://hdr.undp.org/sites/default/files/2015\\_human\\_development\\_report.pdf](http://hdr.undp.org/sites/default/files/2015_human_development_report.pdf)
- Wibowo, S. A., & Parmansyah, P. S. (2018). Poverty curse hypothesis of resource-rich regions, a development paradox in Indonesia. *International Conference on Economics, Business and Economic Education 2018* (pp. 903-914). Semarang: KnE Social Sciences.
- World Bank. (1994). *Infrastructure for development*. Washington, D.C.: The World Bank.
- Wright, G., & Czelusta, J. (2004). The myth of the resource curse. *Challenge*, 47(2), 6-38.